



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo
e-mail : bappeda.pemkab.munbar@gmail.com

Laworo, 06 Mei 2022

Nomor : 005 / 87 / 2022 Kepada
Lampiran : - Yth. ASN Bappeda Kab. Muna Barat
Perihal : Rapat Evaluasi SAKIP di-
Bappeda Tahun 2021 Tempat

Sehubungan dengan Rapat Evaluasi Sakip Bappeda terhadap LHE SAKIP Bappeda Tahun 2021 Nomor : LHE-09/IV/2022 tanggal 28 April 2022, maka diharapkan kepada para ASN Bappeda Kab. Muna Barat agar hadir pada rapat tersebut. Rapat evaluasi tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 09 Mei 2022
Waktu : 13.00 Wita- Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Kab. Muna Barat

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan trimakasih.



Kepala Bappeda
Kabupaten Muna Barat,

RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660804 199003 1 012



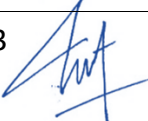

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo
e-mail : bappeda.pemkab.munbar@gmail.com

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Rapat Evaluasi SAKIP Bappeda Tahun 2021
Hari/Tgl : Senin, 09 Mei 2022
Tempat Kegiatan : Ruang Rapat Bappeda Kab. Muna Barat

No.	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si	Kepala Bappeda	1
2	LAODE KHAIRUL ASHAR, ST., M.Sc	Sekretaris Bappeda	2
3	UCOK HERIADY RIDWAN, ST., M.Sc	Kabid Ekososbud & Fisipra	3
4	DENI ANDRIAWATI, S.Hut.,MM	Kabid Penelitian & Pengembangan	4
5	NURSYAMSU ABUBAKAR, ST., MM	Kabid Perencanaan Pengendalian & EP	5
6	LAODE MUH. YUSUF MANGGASA, S.Hut	Staf	6
7	IRAWAN IKHLAS MANGUNTU	Staf	7
8	KARSAID UDO	Staf	8
9	WA SAMNA, ST	Staf	9
10	PUJI PUSPA SARI, S.Si	Staf	10
11	WINDI WILDA NINGSI, S.Si	Staf	11
12	MUHAMAD AL AKBAR, S.Sos	Staf	12

No.	Nama	Jabatan	TandaTangan
13	Kade Agus Setiawan, s.kom	Staf	13 
14	Muhammad Aprian Isnandar, S.Tr.IP	Staf	14 
15			15



Kepala Bappeda
Kabupaten Muna Barat,

RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660804 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
I N S P E K T O R A T

Jln. Lagadi - Tondasi Desa Lapolea Kec. Barangka

LAPORAN HASIL EVALUASI

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
P A D A
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021**



NOMOR : LHE- 00/IV/2022
TANGGAL : 28 APRIL 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
INSPEKTORAT

Jl. Poros Lagadi Tondasi Desa Lapolea Kecamatan Barangka

Laworo, April 2022

Nomor : LHE- 46 /IV/2022
Lampiran : Satu set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Muna Barat

di-
Laworo

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/03.a/INSP/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat serta Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Muna Barat Nomor 090/55/III/INSP/2022 tanggal 28 Maret 2022 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Muna Barat Tahun 2021, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP OPD.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja OPD.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah daerah.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja, dan
- e. Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya. Sehingga evaluasi yang kami lakukan tidak terfokus kepada ada atau tidak adanya dokumen LAKIP, namun terfokus kepada berjalannya sistem AKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mulai dari tahap perencanaan sampai ke pelaporan.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100.

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>85-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>75-85	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabilitas kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	<60-70	Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik taat kebijakan, memiliki sitem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, penerpan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagai perubahan yang sangat mendasar.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Muna Barat memperoleh nilai sebesar **69,81** atau mendapat kategori "**Baik**".

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Muna Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja;	30%	23,92
b.	Pengukuran Kinerja	25%	15,31
c.	Pelaporan Kinerja	15%	10,13
d.	Evaluasi Kinerja	10%	1,50
e.	Capaian Kinerja	20%	18,96
Jumlah		100%	69,81

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Muna Barat menunjukkan capaian kinerja dengan nilai **23,92** dari nilai maksimum **30,00**. Rincian hasil evaluasi terhadap unsur-unsur perencanaan kinerja sebagai berikut:

1) Perencanaan Strategis

Hasil evaluasi atas komponen **“Perencanaan Strategis”** menunjukkan nilai sebesar **7,47** dari nilai maksimal **10,00**, dengan uraian sebagai berikut:

a) Pemenuhan Renstra

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Pemenuhan Renstra”** menunjukkan nilai maksimal **2,00**. Penilaian dilakukan atas keberadaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat 2017-2022, dokumen Renstra OPD 2017-2022 dan Renstra Perubahan (Revisi), serta atribut utama yang ada pada dokumen tersebut, yaitu:

- Tujuan, Indikator Tujuan, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan;
- Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran;
- Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahunan; serta
- Publikasi atas Renstra OPD.

Secara umum Pemenuhan Renstra sudah baik, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah memiliki Renstra Tahun 2017 – 2022 dan Renstra Perubahan yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah.

b) Kualitas Renstra

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Kualitas Renstra”** menunjukkan nilai sebesar **4,22** dari nilai maksimum **5,00**. Nilai

tersebut kurang maksimal disebabkan karena Renstra yang disusun belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

c) Implementasi Renstra

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Implementasi Renstra"** menunjukkan nilai sebesar **1,25** dari nilai maksimal **3,00**. Rendahnya capaian **"Implementasi Renstra"** karena target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan serta belum direviu secara berkala.

2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Hasil evaluasi atas komponen **"Perencanaan Kinerja Tahunan"** menunjukkan nilai sebesar **16,45** dari nilai maksimal **20,00**, dengan uraian sebagai berikut:

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan"** menunjukkan nilai maksimal yaitu sebesar **4,00**. Capaian yang cukup tinggi tersebut karena telah disusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021, dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan PK telah dipublikasikan secara terbuka melalui Website <http://bappeda.munabarakab.go.id>.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan"** menunjukkan capaian **9,75** dari nilai maksimal yaitu **10,00**. Nilai **"Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan"** ini menghampiri nilai maksimal, kurangnya nilai ini disebabkan oleh penyusunan Dokumen PK yang belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas dan fungsi).

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan"** menunjukkan nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal **6,00**. Rendahnya nilai "Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan" disebabkan karena:

- Rencana Aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala,
- Rencana Aksi belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen **"Pengukuran Kinerja"** menunjukkan nilai sebesar **15,31** dari nilai maksimal **25,00**, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Pemenuhan Pengukuran"** menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal **5,00**. Maksimalnya capaian tersebut karena pada dokumen RKT BAPPEDA telah memuat indikator kinerja utama (IKU) dan telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya serta telah memiliki SOP untuk mekanisme pengumpulan data kinerja.

2) Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Kualitas Pengukuran"** menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal **12,50**. Rendahnya capaian tersebut karena Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala serta Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Implementasi Pengukuran"** menunjukkan nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal **7,50**. Rendahnya capaian ini dikarenakan hasil

pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen **“Pelaporan Kinerja”** menunjukkan nilai sebesar **10,13** dari nilai maksimal **15,00**, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pelaporan

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Pemenuhan Pelaporan”** menunjukkan nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal **3,00**.

Kurang maksimalnya nilai pada sub komponen ini dikarenakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah belum menyampaikan LAKIP tahun 2021 secara tepat waktu.

2) Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Penyajian Informasi Kinerja”** menunjukkan nilai sebesar **5,18** dari nilai maksimal **7,50**. Penyebab rendahnya nilai pada sub komponen ini disebabkan karena Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Pemanfaatan Informasi Kinerja”** menunjukkan nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal **4,50** dengan uraian sebagai berikut :

- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja sehingga belum dapat digunakan untuk penilaian kinerja.

D. Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen **"Evaluasi Kinerja"** menunjukkan nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal **10,00**, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Pemenuhan Evaluasi"** menunjukkan nilai sebesar **0,70** dari nilai maksimal **2,00**. Capaian tersebut sangat rendah sebab Evaluasi atas program dan pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan karena hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk perbaikan lebih lanjut.

2) Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen **"Kualitas Evaluasi"** menunjukkan nilai sebesar **0,70** dari nilai maksimal **5,00**, dengan uraian sebagai berikut:

- Belum dilakukan evaluasi atas keberhasilan program,
- Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan,
- Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
- Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Pemanfaatan Evaluasi”** menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari nilai maksimal **3,00**. Rendahnya pemanfaatan evaluasi disebabkan karena hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang serta Hasil evaluasi Rencana Aksi juga belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi atas komponen **“Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi”** menunjukkan nilai sebesar **18,96** dari nilai maksimal **20,00**, dengan uraian sebagai berikut :

1) Kinerja yang Dilaporkan (*Output*)

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Kinerja yang Dilaporkan (*Output*)”** menunjukkan nilai maksimal yaitu **7,50**. Capaian kinerja tersebut didapat berdasarkan evaluasi terhadap Pencapaian Target kinerja, Pencapaian kinerja *output* tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta Keandalan informasi mengenai capaian kinerja *output* yang masing-masing bernilai baik.

2) Kinerja Yang Dilaporkan (*Outcome*)

Hasil evaluasi atas sub komponen **“Kinerja yang Dilaporkan (*Outcome*)”** menunjukkan nilai sebesar **11,46** dari nilai maksimal **12,50**. Capaian kinerja tersebut didapat berdasarkan evaluasi terhadap:

- Pencapaian Target kinerja *outcome*;
- Pencapaian Kinerja *outcome* tahun berjalan dibandingkan kinerja *outcome* tahun sebelumnya;
- Keandalan Informasi capaian kinerja *outcome*.

(Dalam poin A s/d E menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)

5. Terhadap permasalahan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Muna Barat, agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a. Memonitoring pencapaian Target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
 - b. Mengimplementasikan sistem pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP bukan hanya berupa edaran internal agar dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala yang telah berjalan selama ini.
 - c. Melakukan reviu Renstra secara berkala, dibuktikan dengan dokumen pendukung.
 - d. Untuk lebih meningkatkan kualitas Pengukuran Kinerja agar dalam melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.
 - e. Memanfaatkan Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian *reward & punishment*.
 - f. Menyampaikan Laporan kinerja dengan tepat waktu.
 - g. Membuat kebijakan terkait monitoring/evaluasi atas program atau implementasi Rencana Aksi.
 - h. Meningkatkan pemanfaatan Laporan kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan, program/kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
 - i. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
 - j. Melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.
 - k. Menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ini. Kami menghargai upaya Kepala BAPPEDA beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Inspektur Kabupaten Muna Barat



Drs. HAINUDDIN

NIP.19620601 198102 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Muna Barat (Sebagai Laporan) di Laworo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat
3. Kepala Bagian Ortala
4. Arsip